

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	88
-----------------	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perbuatan Pidana	17
B. Tinjauan Umum Mahkamah Kehormatan Dewan	22
1. Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan.....	22
2. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan.....	25
3. Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.....	27

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana	31
1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	34
1.1 Penyidikan.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	42
B. Sifat dan Jenis Penelitian	43
C. Jenis Data	45
D. Lokasi Penelitian.....	47
E. Subjek Penelitian.....	47
F. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	48
G. Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi dan Implikasi Peran MKD Dalam Penanganan Anggota DPR RI yang Diduga Terlibat Tindak Pidana.....	51
1. Mekanisme Beracara MKD Dalam Penanganan Anggota DPR yang Diduga Terlibat Tindak Pidana.....	51
2. Relevansi Peran MKD Sebagai Lembaga Etik dengan Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR.....	56
B. Implikasi dan Bentuk Penerapan Peran MKD Dalam Penanganan Anggota DPR yang Diduga Melakukan Tindak Pidana	65
1. Ketentuan Pidana Pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.....	65
2. Implikasi Adanya Peran MKD Dalam Penanganan Anggota DPR yang Diduga Terlibat Tindak Pidana.....	71
3. Implikasi Peran MKD Terhadap Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Asas-Asas Peradilan Pidana).....	78
4. Penanganan Perkara Oleh MKD.....	90
5. Penanganan Perkara Oleh Kepolisian.....	94

6. Hambatan Dalam Proses Keseluruhan.....	99
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------